



Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh

Nurul Fajar *¹, **Muhammad Arfan** *²

¹ Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

² Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Corresponding Author: arfan_rais@unsyiah.ac.id *²

ABSTRACT

The absorption of SKPD (govemantal working unit/institution) budget contribute to the local government budget absorption as measured by the proportion of the budget that has been disbursed by working unit in one fiscal year. Absorption can be interpreted to compare the budget cap that has been established with a budget that has been realized. This study aimed to analyze the budget absorption in work units Aceh (SKPA). The population in this study was all SKPA (45 SKPA). The results showed that with the implementation of the comparison realization of the budget with a target budget absorption, consistency in the implementation of programs / activities, schedule accuracy withdrawal of your budget can increase budget spending on each SKPA.

KEYWORDS : *Absorption of the budget, Budget of Government, APBD*

1. Pendahuluan

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar khususnya sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001 yang ditandai dengan semakin besarnya kewenangan daerah dalam mengelola dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2014:1), dimana salah satu indikator dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah adalah penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan melalui tingkat penyerapan anggaran, dapat diketahui gambaran mengenai kinerja/ kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2009).

Semakin optimal penyerapan anggaran untuk realisasi kegiatan, maka akan berdampak pada semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam pemerintah daerah harus fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif

sehingga tidak menimbulkan uang daerah yang menganggur (BPKP, 2011:4). Penyerapan anggaran yang tidak optimal merupakan salah satu kendala yang dapat mendorong tingginya pengendapan dana. Sebagai ilustrasi pada akhir tahun 2012 simpanan pemerintah daerah secara nasional di bank umum mencapai Rp. 99,2 triliun (Kementerian Keuangan, 2013:11). Kondisi tersebut mengundang sorotan publik, meskipun terhadap dana yang mengendap tersebut pemerintah daerah mendapatkan hasil berupa pendapatan bunga, namun hal ini merupakan cerminan belum efektifnya kinerja pemerintah terhadap penyerapan anggaran. Jika besaran dana sebesar Rp 99,2 triliun tersebut bisa diserap dan direalisasikan untuk belanja barang dan modal, maka akan mendorong peningkatan *output* pelayanan masyarakat dan mendorong roda perekonomian daerah. Semakin besar tingkat penyerapan anggaran maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran akan menghasilkan dana menganggur (*idle money*) tidak produktif

yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat lain (Fahlevi dan Ananta, 2015:38).

Dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah, fenomena rendahnya penyerapan anggaran tersebut juga terjadi pada Pemerintah Aceh dimana pada tahun 2010 penyerapan anggaran sebesar 92%, tahun 2011 sebesar 92%, tahun 2012 sebesar 89%, tahun 2013 sebesar 89%, dan tahun 2014 sebesar 90% (Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh 2010-2014). Berdasarkan data tersebut dapat dicermati suatu fenomena bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Aceh cenderung belum optimal. Oleh karena itu, peneli termotivasi untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyerapan anggaran pada SKPA

2. Kajian Pustaka

Menurut Harun (2009:100), anggaran adalah perencanaan resmi atas aktivitas atau tindakan yang dinyatakan dalam nilai satuan uang. Dalam tataran sektor publik, menurut Shah (2007:28) anggaran yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama jangka waktu tertentu, menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah selama periode tersebut dan bagaimana pemerintah membiayai kegiatan tersebut. Selanjutnya Shah mengemukakan proses penganggaran pemerintah yang terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan yang melibatkan lembaga eksekutif, tahap persetujuan yang melibatkan lembaga legislatif, tahap implementasi yang dilakukan oleh eksekutif dan tahap akuntabilitas yang melibatkan lembaga pemeriksa.

USAID (2009:1) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat serta berapa banyak dan bagaimana memperoleh pendanaan untuk membiayai rencana tersebut. Dengan demikian, anggaran pemerintah merupakan suatu cara menerjemahkan tujuan maupun strategi organisasi

ke dalam terminologi yang lebih operasional dan diungkapkan secara kuantitatif.

Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran pemerintah disebut juga dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006).

Menurut Noerdiawan (2006:88), APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah dalam hal ini bertindak sebagai lembaga eksekutif, terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP).

Pelaksanaan APBD berkaitan erat dengan proses penyerapan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Mardiasmo (2009), penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD (Malahayati, 2015:11). Noviwijaya dan Rohman (2013) berpendapat bahwa penyerapan anggaran SKPD berkontribusi atas penyerapan anggaran pemerintah daerah melalui pencairan atau realisasi proporsi anggaran satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, secara sederhana penyerapan anggaran dapat diartikan membandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan (Malahayati, 2015:12).

Menurut Nugroho dan Ananda (2013) kemampuan suatu SKPD dalam merealisasikan atau menyerap anggaran yang telah ditetapkan dapat dianggap memenuhi kualifikasi baik dan berhasil apabila realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan aktual fisik pekerjaan yang diselesaikan, dengan asumsi bahwa fisik actual pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Namun demikian, fenomena yang terjadi di lapangan adalah penyerapan anggaran baru akan mengalami peningkatan drastis menjelang akhir tahun pelaksanaan anggaran (BPKP, 2011). Hal tersebut menggambarkan terjadinya ketidakefektifan dalam penyusunan perencanaan anggaran terhadap pelaksanaannya.

Sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat penyerapan anggaran perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan penyerapan anggaran yang rendah secara tidak langsung menunjukkan ketidakcermatan pemerintah daerah dalam hal ini satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan sehingga menimbulkan uang daerah yang menganggur (*idle money*) yang seharusnya dapat dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif (BPKP, 2011).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang

relevan dan membandingkan dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi pada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional, yaitu seluruh SKPA yang terdiri dari 46 SKPA.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi langsung ke lapangan melalui penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh dari kuesioner dikomposisikan terlebih dahulu dengan menggunakan skala *likert*, dimana skala ini memberikan peluang kepada responden untuk mengekspresikan jawaban mereka yang terdiri dari lima pilihan. Data-data yang sudah diperoleh jawabannya kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Indikator yang digunakan terhadap penyerapan anggaran adalah sebagai berikut: (1) Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran; (2) Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan; (3) Ketepatan jadwal penarikan anggaran (Noviwijaya, Rohman 2013 dan Suhartono (2011). Masing-masing indikator tersebut terdiri dari dua pernyataan.

4. Hasil dan Pembahasan

Tanggapan responden pada setiap SKPA terhadap penyerapan anggaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Tanggapan Responden terhadap Penyerapan Anggaran SKPA

No.	Unit Analisis (SKPA)	Penyerapan Anggaran (Y)
1	Sekretariat Daerah	5
2	Sekretariat DPRA	4,6
3	Sekretariat Baitul Mal Aceh	4,3
4	Sekretariat Majelis Adat Aceh	4,5
5	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	4,6
6	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	4,6
7	Dinas Bina Marga	3,8

No.	Unit Analisis (SKPA)	Penyerapan Anggaran (Y)
8	Dinas Cipta Karya	4,2
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5
10	Dinas Kehutanan	4,8
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,7
12	Dinas Kesehatan	4,3
13	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan	5
14	Dinas Keuangan Aceh	4,3
15	Dinas Koperasi dan UKM	4,3
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	4,3
17	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh	4,2
18	Dinas Pendidikan	4,7
19	Dinas Pengairan	4,2
20	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika	4
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4
22	Dinas Perkebunan	4,3
23	Dinas Pertambangan dan Energi	4,5
24	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	4
25	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	2,8
26	Dinas Sosial	3,7
27	Dinas Syariat Islam	4,8
28	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	4,3
29	Badan Arsip dan Perpustakaan	4,3
30	Badan Investasi dan Promosi	4,7
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4,3
32	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4,7
33	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4,2
34	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	4,2
35	Badan Pemberdayaan Masyarakat	3,8
36	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,2
37	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah	3,3
38	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	4
39	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	4,5
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,5
41	Inspektorat Aceh	5
42	Rumah Sakit Ibu dan Anak	5
43	Rumah Sakit Jiwa	4
44	Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin	5
45	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5
	Minimum	2,8
	Maksimum	5
	Mean	3,85

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa ada beberapa SKPA dengan rata-rata tertinggi untuk seluruh pernyataan terhadap penyerapan anggaran yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan Hewan, Inspektorat Aceh, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sedangkan rata-rata terendah diperoleh oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yaitu 2,8.

Untuk keseluruhan unit analisis (SKPA) diperoleh rata-rata 3,85. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata SKPA telah melaksanakan langkah-langkah dalam melaksanakan penyerapan anggaran.

Untuk melihat secara jelas deskriptif responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner terhadap akuntabilitas publik SKPA dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Jawaban Responden tentang Penyerapan Anggaran

No.	Pernyataan	Rata-Rata
1	Realisasi anggaran di instansi saya mampu mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan.	3,55
2	Dalam pengevaluasian keberhasilan penyerapan anggaran di instansi saya selalu dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya.	3,98
3	Pelaksanaan program/kegiatan di instansi saya mengacu pada DPA SKPD.	3,74
4	Permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan selalu segera dicarikan solusi untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai target yang telah direncanakan.	3,83
5	Instansi saya setiap tahun selalu menyusun annual workplan (rencana kerja tahunan) dan disbursement plan (rencana realisasi anggaran).	3,85
6	Pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan dalam DPA di instansi saya dilaksanakan sesuai jadwal annual workplan (rencana kerja tahunan) dan disbursement plan (rencana realisasi anggaran).	4,54
Rata-rata jawaban terhadap penyerapan anggaran		3,85

Sumber: Data Diolah, 2016

Deskripsi tanggapan SKPA terhadap penyerapan anggaran atas pernyataan-pernyataan yang diajukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyerapan anggaran SKPD berkontribusi atas penyerapan anggaran pemerintah daerah yang diukur melalui proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, secara sederhana penyerapan anggaran dapat diartikan membandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan (Malahayati, 2015:12). Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran, konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan, ketepatan jadwal penarikan anggaran, dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,85. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa proporsi anggaran masing-masing SKPA yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target awal dan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya

pelaksanaan perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran, konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan, ketepatan jadwal penarikan anggaran secara baik dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada masing-masing SKPA.

Saran

Untuk meningkatkan penyerapan anggaran SKPA maupun Pemerintah Aceh secara keseluruhan, perlu pelaksanaan perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran, konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan, ketepatan jadwal penarikan anggaran secara baik. Semua komponen tersebut harus bersinergi positif demi terwujudnya penyerapan anggaran secara tepat, cepat, ekonomis dan efisien, sehingga tidak terjadi idol money dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh pada umumnya.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih konkrit terkait dengan penyerapan anggaran melalui wawancara secara khusus terhadap pejabat penatausahaan keuangan maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan pada SKPA.

Daftar Pustaka

- Abe, A. (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja.
- Arif, E., & Halim, Abdul. (2013). *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
- Bastian, I. (2009). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- BPKP. (2011) *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.
- Budiriyanto, E. (2013). *Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: DJPK.
- Cooper, D. R. & Pamela S. S. (2006) *Business Research Methods*. 9thEditions. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). *Laporan Pelaksanaan Spending Performance Dalam Mendanai Pelayanan Publik*. Jakarta: DPIKD.
- Fahlevi, H & M. R. Ananta (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung (Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2): 37- 44.
- Hafidh. (2012). *Banyak Kepentingan Politik, APBD Aceh Tak Juga Rampung*. Disampaikan dalam Diskusi Publik Analisis Anggaran Aceh Tanggal 20 Januari 2012.
- Hermanto, A. (2015). Penyerapan Anggaran Lemah. Melalui < <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150824110117-2/penyerapan-anggaran-lemah>>. Diakses 17 Maret 2016.
- Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang *Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA)*.
- Kuncoro, E. D. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Sistem Aplikasi SiPP pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. *Journal Administrasi Bisnis*, 1(4), 364 - 373.
- Muchsin, M., & A. S. Noor. (2011). *Fenomena Penyerapan Anggaran: Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun*. Yogyakarta: Paris Review.
- Noviwijaya, A & A. Rohman (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3).
- Nugroho, M. A. & C. F. Ananda (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun di KPPN Malang. *Jurnal FEB Universitas Brawijaya*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Purtanto. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Studi atas Persepsi pada Pegawai Program Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas Maret).
- Rahmania, A. & U. Basuki. (2014). Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tegal). *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Tahun 2013. *Jurnal Supremasi Hukum*, 3(2), 198-227.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shah, A. (2007). *Public Sector Governance and Accountability Series: Budgeting and*

Budgetary Institutions. Washington DC: The World Bank.

Yunarto. (2011). *Memahami Proses Penganggaran untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review



